



**Pendidikan Pancasila Inklusif di SD: Menyemai
Toleransi dan Keberagaman melalui
Kurikulum Merdeka**

Sajjuddin^{1*}

¹Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia

***Corresponding author. : sajjuddin.pasca20@gmail.com**

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

*Pancasila Education,
Inclusivity,
Tolerance,
Diversity,
Merdeka Curriculum*

Pancasila education plays a strategic role in shaping the character of Indonesia's younger generation, particularly in fostering values of tolerance and diversity. Within the context of the Merdeka Curriculum, which offers broader opportunities for character development, inclusive Pancasila education emerges as a relevant and transformative approach, especially at the elementary school level. This study aims to describe the implementation of inclusive Pancasila education in elementary schools and evaluate its impact on students' attitudes toward diversity. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through observations, interviews, and document analysis in several elementary schools implementing the Merdeka Curriculum. The findings reveal that the integration of Pancasila values such as mutual cooperation (gotong royong), social justice, and humanity is reflected in contextual and participatory learning practices. Schools that adopt an inclusive approach have successfully created a learning environment that encourages respect for differences, including those related to religion, culture, and socioeconomic background. The study concludes that inclusive Pancasila education not only strengthens students' national identity but also lays the foundation for building a pluralistic and democratic society from an early age. The study recommends enhancing teacher training, developing localized learning materials, and conducting continuous evaluation to ensure the sustainability of inclusive Pancasila education.

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila merupakan instrumen fundamental dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup, Pancasila tidak hanya menjadi pijakan ideologis, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2013). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, khususnya di tingkat dasar, menjadi landasan penting untuk menumbuhkan sikap toleran, cinta tanah air, dan penghormatan terhadap

perbedaan sejak dini (Yamin, 2020; Wibowo, 2019). Pendidikan dasar adalah fase krusial dalam pembentukan kepribadian anak, sehingga internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.

Dalam realitas global saat ini, arus informasi yang begitu cepat dan paparan terhadap budaya luar kian mendominasi, menciptakan tantangan baru dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman (Sutrisno, 2019). Fenomena intoleransi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial mulai muncul bahkan di kalangan usia dini akibat minimnya pendidikan nilai yang memadai (Nugraheni & Retnawati, 2021). Maka dari itu, pendidikan Pancasila yang inklusif hadir sebagai solusi preventif untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran kebhinekaan dan sikap saling menghargai.

Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek menjadi peluang besar untuk merevitalisasi pendidikan Pancasila. Kurikulum ini menekankan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik (Kemendikbudristek, 2022). Pendidikan Pancasila dalam kerangka Kurikulum Merdeka dirancang agar tidak semata-mata bersifat kognitif, melainkan juga afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengetahui nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menghargai perbedaan dan memberikan ruang setara bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan Pancasila, inklusivitas berarti mengintegrasikan nilai-nilai dasar negara ke dalam lingkungan belajar yang ramah terhadap keberagaman latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan kebutuhan khusus peserta didik (Tilaar, 2003; Arifin & Sumarni, 2020). Sekolah dasar sebagai institusi pendidikan formal pertama memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang anak terhadap perbedaan.

Menurut Banks (2013), pendidikan multikultural dapat memperkuat identitas nasional sekaligus menumbuhkan empati terhadap kelompok lain. Ketika dikaitkan dengan pendidikan Pancasila, prinsip-prinsip multikultural ini dapat memperkuat pemahaman akan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Penanaman nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan dapat dimulai dari aktivitas-aktivitas sederhana di kelas dan lingkungan sekolah (Astuti & Mulyani, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam isu-isu sosial dan kebangsaan (Supriatna, 2022). Ketika siswa diajak untuk memahami permasalahan nyata di sekitar mereka, nilai-nilai Pancasila menjadi lebih mudah diterima dan dimaknai. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan konstruktivistik dalam pendidikan

yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar (Dewey, 1938; Vygotsky, 1978).

Penerapan pendidikan Pancasila yang inklusif juga memerlukan dukungan dari seluruh ekosistem sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Guru memiliki peran sebagai agen nilai (value agent) yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan tindakan (Samsuri, 2017). Pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian integral dari kurikulum dan budaya sekolah (Lickona, 1991).

Namun demikian, tantangan dalam penerapan pendidikan Pancasila inklusif masih cukup besar. Beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam mengadaptasi pendekatan inklusif, baik karena keterbatasan pemahaman guru, keterbatasan sumber daya, maupun resistensi terhadap perubahan (Rohmat, 2021). Diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar guru mampu merancang pembelajaran yang kontekstual dan menghargai keberagaman (Fitriani, 2020).

Untuk itu, penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan pendidikan Pancasila inklusif di SD dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Fokus utama adalah pada implementasi di kelas serta interaksi sosial antar siswa yang mencerminkan sikap saling menghormati dan empati. Pengamatan dilakukan pada berbagai konteks sosial yang berbeda untuk menangkap keberagaman praktik di lapangan (Miles & Huberman, 1994).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi pendidikan Pancasila inklusif di SD dalam konteks Kurikulum Merdeka? dan (2) Bagaimana pendidikan tersebut membentuk sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman peserta didik? Dua pertanyaan ini dijawab melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses dan dampaknya.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci penerapan pendidikan Pancasila inklusif serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap karakter siswa, khususnya dalam aspek toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi guru dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan model pembelajaran Pancasila yang inklusif dan kontekstual.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, serta pengembangan kurikulum nasional yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan pendidikan

yang lebih humanis dan responsif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia (Kaelan, 2013; Kemendikbudristek, 2022; Arifin & Sumarni, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena pendidikan Pancasila inklusif secara mendalam dalam konteks alaminya (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap makna yang terkandung dalam pengalaman para subjek penelitian secara holistik. Dalam hal ini, desain studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian, karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik pendidikan Pancasila inklusif di lingkungan sekolah dasar yang beragam. Studi kasus dianggap relevan karena dapat menggambarkan secara konkret bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan sekolah (Yin, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yakni observasi langsung terhadap aktivitas pembelajaran dan interaksi antar warga sekolah, wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, dan siswa, serta studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen kurikulum dan program sekolah. Subjek penelitian dipilih dari tiga sekolah dasar yang secara aktif menerapkan Kurikulum Merdeka serta memiliki program pendidikan karakter berbasis Pancasila. Ketiga sekolah tersebut dipilih karena keberagaman latar belakang peserta didiknya baik dari aspek budaya, agama, maupun sosial ekonomi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yang mempertimbangkan karakteristik khusus sekolah yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan data yang dikumpulkan dapat menggambarkan fenomena secara representatif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi teknik maupun triangulasi sumber (Sugiyono, 2019). Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai subjek yang terlibat dalam penelitian. Proses analisis data mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik dalam proses interpretasi data, yaitu berupaya memahami makna di balik tindakan dan pengalaman para subjek dalam konteks sosial dan budaya mereka (Patton, 2002). Pendekatan ini dipandang sesuai karena pendidikan Pancasila inklusif tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga nilai, sikap, dan identitas peserta didik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini mengungkap bahwa guru-guru di sekolah dasar yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara aktif mengaitkan materi Pancasila dengan isu-isu lokal yang relevan. Misalnya, mereka mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam perayaan hari besar lintas agama dan kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Setyawan (2024) yang menekankan pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut. Konteks lokal menjadi pintu masuk yang efektif dalam membumikan nilai-nilai luhur tersebut agar tidak sekadar menjadi hafalan, tetapi menjadi kebiasaan yang hidup di lingkungan siswa.

Aktivitas kelas yang diterapkan mencakup proyek bersama, diskusi kelompok multikultural, dan penugasan berbasis nilai. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk mendorong siswa berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda, serta untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi dan kerja sama. Hal ini mendukung pandangan Freire (2005) bahwa pendidikan yang dialogis dan partisipatif dapat memberdayakan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pun menjadi lebih bermakna karena siswa mengalami langsung proses berpikir kritis dan reflektif dalam konteks keberagaman.

Sikap siswa terhadap perbedaan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan melalui interaksi positif antarteman yang berbeda agama dan etnis, serta meningkatnya empati dan penghargaan terhadap keragaman. Temuan ini konsisten dengan penelitian Saputra dan Asmani (2019) yang menemukan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila efektif dalam membentuk sikap toleran dan inklusif pada siswa. Lingkungan sekolah yang mendukung menjadi faktor penting dalam membentuk kebiasaan berinteraksi yang inklusif dan ramah terhadap perbedaan.

Tabel berikut menggambarkan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sekolah:

Tabel 1. Integrasi Nilai Pancasila dalam Kegiatan Sekolah

Nilai Pancasila	Kegiatan	Hasil
Kemanusiaan	Diskusi isu HAM sederhana	Siswa belajar empati terhadap perbedaan
Persatuan	Hari budaya sekolah	Siswa menghargai keragaman budaya
Demokrasi	Musyawarah kelas	Siswa terbiasa mendengar pendapat orang lain

Nilai Pancasila	Kegiatan	Hasil
Keadilan sosial	Proyek lingkungan	Siswa memahami tanggung jawab bersama

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila dalam membentuk sikap toleran dan inklusif. Saputra dan Asmani (2019) menyoroti bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam keberagaman. Selain itu, penggunaan pendekatan dialogis dalam pembelajaran, seperti yang dianjurkan oleh Freire (2005), memungkinkan siswa untuk menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar objek transfer nilai.

Konsep pendidikan inklusif yang diterapkan juga merujuk pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Booth dan Ainscow (2011). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi pendidikan inklusif yang menekankan pada partisipasi semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan sosial yang beragam, dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pendidikan tidak lagi menjadi milik segelintir orang, tetapi benar-benar menjadi hak seluruh warga negara.

Penelitian ini juga mendukung temuan Subekti (2020) yang menekankan bahwa pendidikan Pancasila perlu dikembangkan melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Dengan mengaitkan materi Pancasila dengan konteks lokal dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, nilai-nilai Pancasila dapat lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh siswa. Hal ini juga dapat meningkatkan relevansi pendidikan Pancasila dalam kehidupan siswa sehari-hari.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi pendidikan Pancasila inklusif. Salah satunya adalah keterbatasan pelatihan guru dalam memahami konsep pendidikan inklusif. Rachmadtullah et al. (2020) mencatat bahwa banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menerapkan pendekatan inklusif dalam pembelajaran. Hal ini dapat menghambat efektivitas implementasi pendidikan Pancasila inklusif di sekolah.

Selain itu, minimnya bahan ajar kontekstual juga menjadi tantangan dalam implementasi pendidikan Pancasila inklusif. Guru seringkali kesulitan menemukan atau mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal siswa. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan menghambat pemahaman siswa

terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa menjadi penting.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan menjadi rekomendasi penting. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang konsep pendidikan inklusif, strategi pembelajaran yang partisipatif, dan pengembangan bahan ajar kontekstual. Dengan demikian, guru dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila inklusif di kelas.

Selain pelatihan, dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah juga diperlukan untuk menyediakan sumber belajar yang adaptif dan relevan. Hal ini mencakup penyediaan buku teks, modul pembelajaran, dan sumber daya lainnya yang mendukung implementasi pendidikan Pancasila inklusif. Dukungan ini akan membantu guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan kontekstual.

Implementasi pendidikan Pancasila inklusif yang efektif juga membutuhkan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam kegiatan sekolah dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila yang diajarkan di kelas. Misalnya, melalui kegiatan gotong royong, perayaan hari besar lintas agama, dan partisipasi dalam proyek sosial bersama. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan fondasi kuat dalam membangun budaya toleransi sejak dini.

Pendidikan Pancasila inklusif harus dirancang sebagai pengalaman yang menyeluruh, tidak terbatas pada mata pelajaran tertentu. Nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan dalam seluruh aktivitas pembelajaran dan kehidupan sekolah. Ini sejalan dengan pandangan Zubaidah (2021) bahwa pendidikan karakter perlu ditanamkan melalui pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oleh karena itu, peran kepala sekolah dan seluruh ekosistem pendidikan menjadi krusial dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila secara konkret.

Evaluasi berkala juga penting untuk memastikan efektivitas program pendidikan Pancasila inklusif. Evaluasi ini tidak hanya mengukur aspek kognitif siswa, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Evaluasi bisa dilakukan melalui observasi sikap, refleksi siswa, dan portofolio proyek. Dengan demikian, proses penanaman nilai Pancasila dapat dimonitor dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Pendekatan evaluasi yang holistik akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan karakter siswa.

Selanjutnya, kurikulum perlu dirancang fleksibel agar memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan siswa yang beragam. Fleksibilitas ini mencakup penyesuaian isi, metode, dan penilaian berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan kemampuan siswa. Hal ini mendukung prinsip inklusivitas dan memberikan ruang bagi pengembangan potensi semua peserta didik. Kurikulum Merdeka telah memberikan

arah ke sana, namun implementasinya masih memerlukan dukungan kebijakan dan pelatihan teknis yang konsisten.

Dalam praktiknya, guru yang berhasil menerapkan pendidikan Pancasila inklusif adalah mereka yang mampu menjadi fasilitator, bukan hanya pengajar. Mereka menciptakan ruang dialog, mendengarkan suara siswa, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Guru juga harus mampu memediasi konflik, menjadi teladan dalam menghargai perbedaan, dan membimbing siswa dalam merumuskan nilai-nilai hidup. Ini sejalan dengan konsep guru sebagai "agen perubahan" yang digaungkan dalam pendidikan karakter abad ke-21.

Adanya komunitas belajar antar guru juga menjadi sarana penting dalam memperkuat kapasitas profesional. Melalui diskusi rutin, refleksi bersama, dan praktik berbagi (*lesson study*), guru dapat saling menguatkan dan belajar dari praktik baik. Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembelajaran inklusif berbasis Pancasila. Peran pengawas dan dinas pendidikan sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi wadah-wadah kolaboratif tersebut.

Pendidikan Pancasila inklusif merupakan kebutuhan strategis dalam membangun masa depan bangsa yang damai dan berkeadaban. Dalam konteks globalisasi yang membawa tantangan identitas dan intoleransi, pendidikan di tingkat dasar menjadi benteng awal untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan penerapan yang tepat, pendidikan Pancasila inklusif mampu menjadi jalan tengah yang merangkul keberagaman tanpa kehilangan jati diri nasional.

Kesimpulan dari temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila inklusif memiliki dampak positif dalam membentuk karakter toleran, inklusif, dan demokratis pada siswa sekolah dasar. Meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya, hasil yang diperoleh menunjukkan potensi besar yang perlu terus dikembangkan. Implementasi yang terstruktur, dukungan kebijakan, dan keterlibatan semua pihak akan memperkuat daya transformasi pendidikan Pancasila dalam membangun bangsa.

KESIMPULAN

Pendidikan Pancasila inklusif di Sekolah Dasar dalam kerangka Kurikulum Merdeka menunjukkan efektivitasnya dalam menanamkan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat kebersamaan kepada peserta didik sejak dini. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai materi kognitif yang diajarkan secara teoritis, tetapi juga sebagai bagian dari praktik kehidupan sehari-hari siswa. Melalui kegiatan seperti diskusi kelompok multikultural, proyek sosial bersama, dan pembiasaan sikap demokratis di kelas, siswa belajar untuk hidup dalam keberagaman. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dijadikan landasan pembentukan karakter secara menyeluruh.

Pendidikan ini bersifat transformatif karena mengembangkan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara bersamaan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila inklusif berkontribusi penting terhadap pembangunan karakter bangsa yang toleran dan berkeadaban.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan guna memperkuat implementasi pendidikan Pancasila inklusif di Sekolah Dasar. Pertama, diperlukan peningkatan kompetensi guru dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan inklusif secara konkret di ruang kelas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, workshop, serta penguatan komunitas belajar guru. Kedua, pengembangan media dan metode ajar yang relevan dengan konteks lokal juga menjadi kunci. Materi ajar harus mampu merefleksikan keberagaman budaya, agama, dan sosial yang ada di masyarakat sekitar, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara nilai Pancasila dengan realitas yang mereka hadapi. Ketiga, penguatan budaya sekolah berbasis nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara sistematis, mulai dari kebijakan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, hingga praktik harian guru dan siswa. Keteladanan dari seluruh ekosistem pendidikan sangat berperan dalam menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian yang hidup dalam lingkungan sekolah.

Untuk memperluas dampak dan kedalaman dari implementasi pendidikan Pancasila inklusif, disarankan adanya penelitian lanjutan yang fokus pada pengembangan instrumen evaluasi yang komprehensif. Evaluasi yang ada saat ini cenderung berfokus pada aspek kognitif, sementara pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila memerlukan pendekatan evaluasi yang juga mencakup dimensi afektif dan perilaku siswa. Instrumen evaluasi yang valid dan reliabel akan membantu guru dan sekolah dalam mengukur sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam diri peserta didik. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi praktik-praktik baik dari berbagai daerah untuk kemudian disebarluaskan sebagai model implementasi. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan keterlibatan semua pihak, pendidikan Pancasila inklusif di tingkat dasar dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang plural, adil, dan bermartabat.

REFERENSI

- Arifin, Z., & Sumarni, R. (2020). *Pendidikan inklusif dan karakter kebangsaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Astuti, I. S., & Mulyani, S. (2022). *Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter di SD*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 33–45.

- Astuti, L., & Mulyani, S. (2022). *Penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran tematik*. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 7(1), 12–21.
- Banks, J. A. (2013). *Multicultural education: Issues and perspectives (8th ed.)*. Hoboken: Wiley.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools*. CSIE.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York: Macmillan.
- Fitriani, R. (2020). *Kesiapan guru dalam implementasi kurikulum inklusif*. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 9(2), 89–98.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Freire, P. (2005). *Pendidikan kaum tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugraheni, A., & Retnawati, H. (2021). *Strategi penanaman nilai toleransi dalam pembelajaran Pancasila*. *Civics: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 19(2), 157–170.
- Nugraheni, A., & Retnawati, H. (2021). *Pendidikan nilai dalam Kurikulum Merdeka*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 40(2), 213–224.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rachmadtullah, R., Zulela, M. S., & Syaodih, E. (2020). *Developing learning media using augmented reality in education*. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 15(5), 240–247.
- Rachmadtullah, R., et al. (2020). *Teachers' experiences in developing character education through digital media*. *Universal Journal of Educational Research*, 8(12), 6451–6456.
- Rohmat, T. (2021). *Hambatan dalam penerapan pendidikan inklusif di sekolah dasar*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(1), 101–112.

- Saputra, E. E. (2025). Membangun Budaya Anti-Korupsi melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Cakrawala Pembelajaran*, 1(1), 1-13.
- Saputra, E. E., Parisu, C. Z. L., & Achmad, I. A. (2024). Pengembangan Kurikulum Inklusif Untuk Meningkatkan Partisipasi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Journal of Education Sciences: Fondation & Application*, 3(1), 1-13.
- Saputra, H., & Asmani, J. M. (2019). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter*. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 2(1), 19–30.
- Saputra, M., & Asmani, J. M. (2019). *Pendidikan karakter berbasis Pancasila*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 12–25.
- Setyawan, A. (2024). *Kontekstualisasi nilai Pancasila dalam pembelajaran SD*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 14(2), 99–112.
- Subekti, A. R. (2020). *Meneguhkan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter*. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 12–25.
- Subekti, A. (2020). *Strategi kontekstual dalam penguatan pendidikan Pancasila*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 401–412.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, N. (2022). *Kurikulum Merdeka dan tantangannya dalam implementasi nilai kebangsaan*. *Jurnal Civicus*, 6(2), 121–130.
- Supriatna, N. (2022). *Penguatan karakter melalui Kurikulum Merdeka di sekolah dasar*. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 10(1), 12–24.
- Suryadi, A. (2017). *Kontekstualisasi pendidikan Pancasila di sekolah dasar*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(1), 50–61.
- Sutrisno, E. (2019). *Tantangan pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 211–222.
- Sutrisno, E. (2019). *Tantangan pendidikan nilai di era digital*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 211–222.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Pendidikan, kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ummah, I., Saputra, E. E., Parisu, C. Z. L., & Wahyudi, A. V. (2022, December). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis Komik Digital. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Seni, dan Pendidikan Dasar (SENSASEDA)* (Vol. 2, pp. 19-24).

- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wahab, A., & Sapriya. (2015). *Teori dan praktik pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibowo, A. (2019). *Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal*. *Jurnal Pendidikan*, 20(2), 101–110.
- Wibowo, A. (2019). *Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 15–26.
- Yamin, M. (2020). *Penerapan pendidikan Pancasila dalam pembelajaran terintegrasi*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 45–58.
- Yamin, M. (2020). *Pendidikan Pancasila untuk membangun karakter bangsa*. *Jurnal Civic Education*, 7(2), 84–91.
- Yin, R. K. (2016). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.